

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Budimansyah (2010, hlm. 1), terdapat dua hal utama dalam menjaga eksistensi bangsa Indonesia yakni dengan pembangunan bangsa dan pembangunan karakter. Hal ini diperkuat dengan pendapat Akbal (2016, hlm. 485) yang mengatakan bahwa salah satu indikator penentu eksistensi bangsa dan negara ialah apabila masyarakat bangsanya memiliki nilai-nilai karakter yang baik (sesuai dengan dasar falsafah negaranya). Salah satu cara membangun karakter yaitu melalui pendidikan karakter (Alawiyah, 2012, hlm. 89). Menurut Zurqoni, Retnawati, Heri dan Janu (2018) pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana yang tepat untuk menginternalisasi nilai-nilai karakter.

Namun demikian, masih marak terjadinya permasalahan yang mencerminkan krisis karakter pada bangsa Indonesia. Permasalahan tersebut sering dijumpai dalam pemberitaan di media, baik media cetak seperti koran, maupun media elektronik seperti televisi. Salah satu kasus yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berada dalam krisis karakter yakni maraknya praktik korupsi di Indonesia (Alawiyah, 2012, hlm. 88). Dilansir dari portal berita *kompas.com*, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat terdapat 1.298 terdakwa kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2020, dengan kerugian 56,7 triliun (Guritno, 2021).

Maraknya kasus korupsi di Indonesia tidak terlepas dari faktor yang melatarbelakangi. Menurut Isa Wahyudi (2007) (dalam Utari, 2011, hlm. 40)

tindak korupsi dapat berawal dari dalam individu yang menjadi pelaku maupun dorongan dari lingkungan individu pelaku korupsi, lebih rinci dijabarkan sebagai berikut: 1) konsumtif, 2) keserakahan manusia, 3) etos kerja rendah, 4) konsumtif. Pendapat serupa juga disampaikan Hardjapamekas (2008) menyatakan bahwa meningkatnya praktik korupsi dikarenakan oleh: 1) Elit bangsa yang tingkat keteladanan dan kepemimpinan yang rendah, 2) Upah Pegawai Negeri Sipil yang kecil, 3) Penegakan hukum serta peraturan perundang-undangan yang lemah, 4) Pengetahuan dan kredibilitas yang rendah, 5) Prosedur pemeriksaan internal di segala lembaga keuangan, perbankan, dan birokrasi belum stabil, 6) Keadaan pada lingkungan kerja, lingkungan masyarakat dan tugas jabatan, dan 7) Moral yang rendah.

Dalam bukunya, Branson (1999, hlm. 8) menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) memiliki tiga elemen utama, yakni: pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak kewarganegaraan (*civic dispositions*). Ketiga elemen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lain, karena merupakan pondasi dari pendidikan kewarganegaraan. Semua dilakukan agar tercapainya tujuan pendidikan kewarganegaraan yakni menumbuhkan karakter warga negara yang baik dan cerdas (*good and smart*).

*Civic disposition* (karakter kewarganegaraan) menjadi muara bagi kedua komponen lainnya yakni *civic knowledge* dan *civic skill* (Aini et al., 2018). *Civic disposition* dalam pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) tergambar sebagai karakter yang dibutuhkan untuk menjaga dan mengedepankan kewarganegaraan dan pemerintahan (Malatuny & Rahmat,

2016). Sebagai ranah afektif dari *civic education* (pendidikan kewarganegaraan), maka *civic disposition* penting diterapkan. Hal ini selaras dengan pernyataan Popham (1995) (dalam Winarno, 2013, hlm. 194).

Penerapan *civic disposition* dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni melalui beragam model dalam pembelajaran nilai (seperti model konsiderasi, model pembentukan rasional, klarifikasi nilai, pengembangan moral kognitif dan model nondirektif) serta pendekatan pendidikan moral nilai menurut Douglas Superka (Winarno, 2013). Margaret Stimmann Branson (1998) menambahkan bahwa penerapan *civic disposition* dapat pula dilakukan dengan cara meneladani sikap warga negara teladan.

Mohammad Hatta merupakan salah satu dari banyak warga negara teladan di Indonesia. Keteladanan Mohammad Hatta sering dijadikan contoh untuk generasi muda. Salah satu keteladanan Mohammad Hatta dalam sikapnya menolak praktik korupsi diceritakan oleh Abu Jazid Seribu Jaya Bakti (1990), dimana saat itu Mohammad Hatta didatangi oleh stafnya, dan membicarakan mengenai harta karun yang ditemukan masyarakat, staf itu mengusulkan agar memanggil masyarakat secara diam-diam dan menyimpan harta karun tersebut. Akan tetapi, Mohammad Hatta menolaknya dengan alasan bahwa harta karun itu milik Tuhan dan hak orang banyak. Lalu menyuruh staf untuk memberi tahu kepada seluruh rakyat karena itu adalah hak mereka (Penghulu, 2020, hal 94).

Menurut Watson (2019), dalam pendidikan, metode yang paling utama dan paling efektif adalah keteladanan. Di dalam keteladanan seseorang akan belajar bagaimana memberikan contoh ucapan atau perbuatan yang baik untuk

ditiru sehingga hasil yang diperbuat juga baik. Keteladanan dibagi menjadi dua, yakni keteladanan sengaja dan keteladanan yang tidak disengaja. Keteladanan disengaja merupakan peniruan yang nyata, seperti orang tua, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Sedangkan, keteladanan tidak disengaja merupakan keteladanan yang berasal dari sosok yang di idolakan, misalnya pahlawan (Damanhuri, 2014, hlm. 106)

Sastra menjadi salah satu media untuk pembangunan karakter bangsa (*character engineering and nation building*). Kemampuan untuk memupuk dan mengembangkan rasa empati, toleransi, dan membuat penilaian etis, yang dapat diperoleh melalui studi tentang sastra dan Ilmu-ilmu Humaniora lainnya, merupakan modal utama yang sama sekali tidak dapat diabaikan dalam pembangunan bangsa (Al-Ma'ruf & Nugrahani, 2017). Fungsi sastra menurut Horatius, filsuf Yunani, sastra memiliki fungsi *dulce et utile* (menghibur dan berguna). Salah satu contoh sastra ialah otobiografi.

Otobiografi berisi mengenai perjalanan hidup dari si penulis. Dengan kata lain, otobiografi adalah biografi yang ditulis oleh pengarangnya langsung. Branson memperkuat bahwa dalam penerapan *civic disposition*, otobiografi merupakan media dalam mengenalkan warga negara teladan. Buku *Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi* merupakan salah satu karya fenomenal dari Mohammad Hatta. Buku ini merupakan terbitan ulang dari buku yang berjudul *Mohammad Hatta: Memoir* terbitan Tinta Mas. Menceritakan bagaimana perjalanan hidup *founding father* dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, hingga berakhirnya KMB.

Sebagai sebuah sastra, buku *Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi* bukan hanya mengandung unsur menghibur (*dulce*), tetapi juga mengandung nilai moral di dalamnya (*utile*). Dengan demikian, penelitian ini ingin mengungkapkan nilai-nilai yang berkenaan dengan *civic disposition* sehingga dapat menjadi keteladanan untuk menekan kasus korupsi dan menjadi warga negara yang cerdas dan baik.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, mengenai belum tercapainya tujuan dari pendidikan kewarganegaraan yakni membentuk *civic disposition* (karakter kewarganegaraan) yang cerdas dan baik, hal ini dibuktikan oleh masih maraknya kasus korupsi di tanah air. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat relevan dengan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karena: 1) Salah satu pendidikan dalam membentuk karakter bermoral melalui pendidikan kewarganegaraan; 2) *civic disposition* (karakter kewarganegaraan) merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan kewarganegaraan.

## 1.2 Fokus dan sub fokus

Penelitian ini berfokus pada muatan *civic disposition* yang terkandung dalam buku *Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi*. Adapun sub fokus pada penelitian ini merupakan muatan *civic disposition* yang meliputi karakter privat dan karakter publik. Karakter privat terdiri dari tanggung jawab moral, disiplin diri serta Penghormatan terhadap harkat dan martabat. Sedangkan, karakter publik terdiri dari kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, menaati aturan

(*rule of law*), berpikir kritis, kemauan untuk mendengarkan serta bernegosiasi dan berkompromi.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, serta fokus dan sub fokus yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana karakter privat dalam buku *Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi*?
2. Bagaimana karakter publik dalam buku *Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi*?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah:

1. Menjelaskan karakter privat dalam buku *Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi*
2. Menjelaskan karakter publik dalam buku *Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi*

### 1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, terbagi menjadi dua manfaat, yakni manfaat teoritis serta manfaat praktis. Berikut uraian dari manfaat dalam penelitian ini, antara lain:

#### 1. Manfaat Teoritis

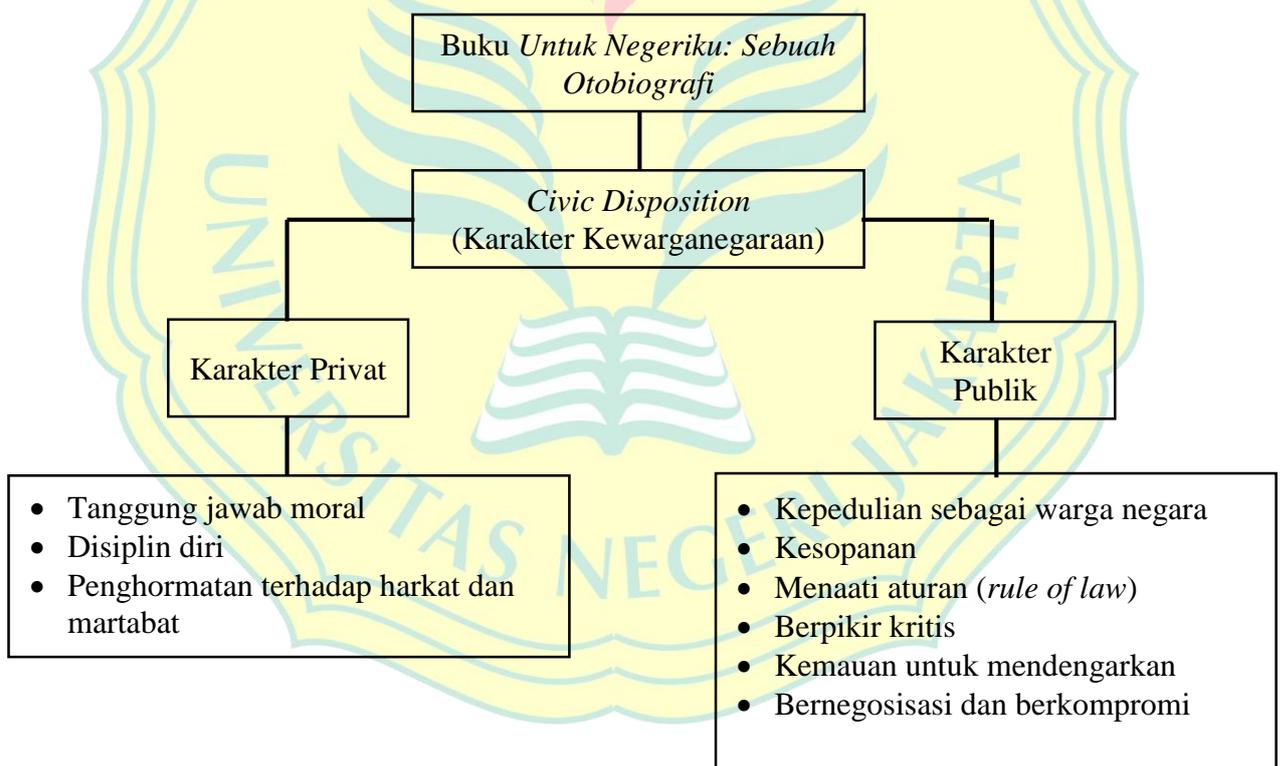
Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam dunia pendidikan kewarganegaraan, khususnya mengenai muatan *civic*

*disposition* yang terdapat dalam buku *Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi*.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai informasi bagi masyarakat mengenai muatan *civic disposition* buku *Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi*.
- b) Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan membahas mengenai topik yang serupa dengan sudut pandang yang berbeda

### 1.6 Kerangka konseptual



Bagan 1. 1 Kerangka Konseptual

Sumber: Data olahan penelitian